

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENGRAJIN PURUN DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATANWAMPU KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

O L E H

**SUYONO
NPM : 231801025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENGRAJIN PURUN DI DESA MEKAR JAYA
KECAMATANWAMPU KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**U
M
A**

SUYONO

NPM : 231801025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan
Pengerajinan Purun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat**

N a m a : Suyono

N P M : 231801025

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Adam, MAP

Pembimbing II



Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 12 April 2025

Nama : Suyono

NPM : 231801025



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I : Dr. Adam, MAP
Pembimbing II : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D
Penguji Tamu : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,
Yang menyatakan,



Suyono

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyono
NPM : 231801025
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Purun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan


Suyono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Pengerajinan Purun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupayen Langkat**”, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan dan pemerintah.

Medan, April 2025
Penulis



Suyono

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJINAN PURUN DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT

Nama : Suyono

NPM : 231801025

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP

Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan pengrajin purun di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pengrajin purun di desa ini berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan keterampilan, akses pasar, dan modal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang pemasaran, dan penyediaan akses terhadap modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa sangat berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas pengrajin, serta memperkuat jaringan pemasaran produk purun. Ditemukan bahwa sinergi antara pemerintah desa, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta juga berperan penting dalam memperluas peluang bagi pengrajin. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan pengrajin purun tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah desa, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektoral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi lokal di desa-desa lain.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pemberdayaan, Pengrajin Purun, Desa Mekar Jaya, Ekonomi Lokal.

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING PURUN CRAFTS IN MEKAR JAYA VILLAGE, WAMPU DISTRICT, LANGKAT REGEN

Name : Suyono
NPM : 231801025
Study Program : *Master of Public Administration*
Supervisor I : Dr. Adam, M.AP
Supervisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

This study aims to analyze the role of village government in empowering purun craftsmen in Mekar Jaya Village, Wampu District, Langkat Regency. With abundant natural resource potential, purun craftsmen in this village contribute to the local economy. However, they face various challenges, such as limited skills, market access, and capital. Through a qualitative approach, this study explores various programs and initiatives carried out by the village government, including skills training, marketing counseling, and providing access to capital. The results of the study indicate that the active involvement of the village government is very influential in increasing the capacity of craftsmen, as well as strengthening the marketing network for purun products. It was found that synergy between the village government, non-governmental institutions, and the private sector also played an important role in expanding opportunities for craftsmen. The conclusion of this study confirms that the success of empowering purun craftsmen does not only depend on the initiative of the village government, but also on the active participation of the community and cross-sectoral collaboration. This study is expected to provide recommendations for the development of more effective policies in empowering the local economy in other villages.

Keywords: Village Government, Empowerment, Purun Craftsmen, Mekar Jaya Village, Local Economy

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Peran	7
2.2 Peran Pemerintah	10
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	15
2.3.1 Konsep Pemberdayaan	15
2.3.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	18
2.4 Pengertian Purun	21
2.5 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	21
2.6 Pemberdayaan UMKM	28
2.7 UMKM Kerajinan Purun	30
2.8 Kerangka Pikir Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Definisi Konsep dan Operasional	35
3.6.2. Definisi Konsep	36
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Profil Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu	41
4.2 Pembahasan 47	
4.2.1 Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Pengerajin Purun di Desa	47
4.2.2 Faktor Penghambat Desa dalam Pemberdayaan Pengerajin Purun di Desa	65
BAB V	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan 72	
5.2 Saran 72	
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran Dokumentasi Wawancara	80

DAFTAR TABEL

Table 1 Karakteristik UMKM	24
Table 2 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemberdayaan UMKM pengrajin purun.....	31
Gambar 2 Model analisis interaktif Miles	37
Gambar 3 Peta Desa Mekar Jaya	42
Gambar 4 Struktur Organisasi.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM relatif lebih bertahan dalam menghadapi krisis tersebut, dari pada usaha yang besar yang mengalami kebangkrutan.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia selama ini menunjukkan posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan kegiatan perekonomian diberbagai sektor, penyedia lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang patut diakui sebagai kekuatan strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi (Hafsah, 2004). Perihal ini dikarenakan potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tantangan yang dihadapi UMKM untuk memperkuat struktur perekonomian nasional masih terbilang berat. Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain : permasalahan dalam permodalan, rendahnya manajemen sumber daya manusia,

dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi. Di samping itu, kehidupan sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi pengembangan UMKM.

Di Indonesia, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi mulai diakui dan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif mulai banyak dibicarakan pada masa pemerintahan sekarang. Implementasi konsep ekonomi kreatif ke bentuk pengembangan industri kreatif adalah solusi cerdas dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis di era persaingan global.

Kecamatan Wampu merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kecamatan Wampu seluas 194,21 dengan jumlah Desa di Kecamatan Wampu ada 13 Desa dan satu Kelurahan yaitu Kelurahan Bingai. Desa Mekar Jaya dengan jumlah penduduk 3187 jiwa dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh harian lepas, Desa Mekar Jaya mayoritas warganya, terutama wanita pandai menganyam purun. Purun adalah sejenis rumput yang tumbuh liar di rawa dan biasanya dijadikan sebagai bahan baku kerajinan anyaman. Purun yang akhirnya menjadi salah satu hasil kekayaan alam yang telah diubah secara manual menjadi produk kerajinan dan sangat potensial untuk terus dikembangkan. Masyarakat biasanya menganyam purun untuk dijadikan bakul, tikar, tas yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hasil kerajinan purun menjadi salah satu komoditas ekspor yang cukup diminati dipasar dunia sehingga permintaannya cukup besar. Namun hasil produksinya hingga kini masih belum mampu memenuhi permintaan pasar, akibat terkendala dengan masalah desain, kualitas produk dan lainnya, termasuk kesulitan memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Ekonomi kreatif yang merupakan suatu konsep ekonomi di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Kerajinan ialah bagian dari kegiatan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk

yang dihasilkan oleh para pengrajin, berawal dari desain sampai proses penyelesaian produk. Kegiatan usaha kerajinan anyaman purun merupakan suatu kegiatan usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi, dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, kerajinan anyaman purun dapat menghidupi banyak orang, baik secara usaha pokok maupun sebagai usaha sampingan atau usaha musiman masyarakat. Manfaat purun dalam menyejahterakan masyarakat semakin dirasakan setelah di kukuhkannya Desa Mekar Jaya sebagai salah satu ladang rejeki masyarakat di kecamatan wampu. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin anyaman purun di desa ini sebanyak 265. Selama ini produk yang dihasilkan oleh pengrajin purun masih sangat terbatas hanya dapat membuat bakul dan tikar dengan motif yang monoton dengan kualitas yang masih sederhana.

Dalam rangka pemberdayaan usaha pengrajin purun ini agar bisa memberikan hasil produksi yang lebih banyak sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat tentu sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama peran dari pemerintah Desa, kecamatan maupun pemerintahan jenjang yang lebih tinggi. Pemerintahan Desa dan kecamatan telah berpartisipasi dalam pemberdayaan usaha pengrajin purun, aktivitas yang dilakukan pemerintah, melalui berbagai pelatihan. Dengan adanya kegiatan pelatihan ternyata berdampak positif bagi pengrajin purun, mereka semakin semangat dalam berinovasi sehingga produk yang dihasilkan sekarang lebih kreatif, beragam, serta dapat memenuhi keinginan pasar. Masyarakat Desa Mekar Jaya mampu membuat alat penumbuk otomatis sehingga produksi purun yang dihasilkan dapat lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas. Beberapa produk yang dihasilkan oleh masyarakat antara lain tikar, topi, tas, alas meja, alas piring, pot, dll. Beberapa kerajinan juga semakin menarik dengan sentuhan warna dan motif yang beragam.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengelolaan sumber daya di tingkat

desa. Berikut adalah beberapa poin penting dari undang-undang ini:

1. Definisi Desa: Undang-undang ini menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat, dan kepentingan lokal.
2. Pemerintahan Desa: Setiap desa memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
3. Kewenangan Desa: Desa diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, sosial, dan ekonomi. Desa juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
4. Anggaran dan Pendanaan: Undang-undang ini mengatur sumber pendanaan bagi desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat dan daerah, serta sumber-sumber lain yang sah.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan desa.
6. Pengawasan dan Akuntabilitas: Menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan desa agar pengelolaan dana dan program dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi, dan dukungan kebijakan. Siagian (2012) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan nasional mencakup stabilisasi, inovasi, modernisasi, dan pelayanan publik. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tanggung jawab dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui berbagai program pemberdayaan.

Arif (2014) mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi empat aspek utama:

1. **Regulator:** Menetapkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung usaha kecil dan menengah.
2. **Dinamisator:** Mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat.
3. **Fasilitator:** Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
4. **Katalisator:** Mempercepat proses pemberdayaan melalui sinergi dengan sektor swasta dan non-pemerintah.

Dalam konteks desa, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal dan mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintahan Desa Purun telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan usaha pengrajin purun namun belum memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengrajin maupun pemerintahan, namun dilihat dari hasil produksi belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terjadi karena masih ditemui beberapa permasalahan diantaranya adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pengrajin ini tidak bersifat formal atau merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga, pekerjaan mengayam masih manual atau dikerjakan dengan tangan, kualitas sumber daya pengrajin masih bervariasi sehingga kualitas produksinya belum seragam, dan juga masih sangat terbatas modal kerja yang dimiliki oleh pengrajin.

Untuk mengetahui secara detail terkait dengan pemberdayaan usaha pengrajin purun ini dapat diketahui melalui penelitian, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul : Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan UMKM Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang berupa :

1. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat..
2. Apa faktor kendala Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat..
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat..

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Bagi Ilmu Pengetahuan Akademi, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
2. Bagi Pemerintah, dapat digunakan untuk mengetahui kendala terkait Peran Pemerintahan Desa Dalam pemberdayaan Usaha Pengrajin Purun di Desa Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat..
3. Bagi pelaku kerajinan purun , penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap pengrajin purun khususnya dalam mengembangkan usaha untuk menambah omzet yang mereka dapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Menurut Depdikbud (2015:751) bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2016:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peranan lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja

daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri.

Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

1. *Expectation* (harapan).
2. *Norm* (norma).
3. *Performance* (wujud perilaku)
4. *Evaluation* (penilaian) dan
5. *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.

- 2) Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role- expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:

- a) Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- b) Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
- c) Wujud Perilaku Dalam Peran: Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.
- d) Penilaian dan Sanksi: Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk

mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutnya juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

2.2 Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari

tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumberdayasumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Riyadi & Bratakusamah (2004: 8).

Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturanperaturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiapkegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepadamasyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebaai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan amantermasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan

prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Peran dan Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah merupakan pemerintah yang memiliki kewenangan yang strategis dan mempunyai kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, kemakmuran serta ketentraman bagi masyarakat (Hayat et al., 2018).

(Harapan, n.d.) Ada 4 peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. *Entrepreneur* yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.

2. Koordinator sebagai menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi dalam pembangunan.
3. Fasilitator sarana dan prasarana.
4. Stimulator yaitu sebagai pendorong dalam pengembangan usaha melalui tindakan.

Davey (2011:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain : Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.

1. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
2. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
3. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
4. Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut Siagian (2012:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) **Stabilisator**, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b) **Inovator**, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c) **Modernisator**, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolahkekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d) **Pelopopor**, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian

terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

- e) **Pelaksana sendiri**, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena istilah tersebut mengacu kepada ketidakmampuan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan membutuhkan program pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah masing-masing.

Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakanlah memberi “energy” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Sulistiyani, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79).

Rappaport (dalam Suharto, 2009, hlm. 59) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas

diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Sumodiningrat (dalam Mardikanto & Soebiato 2013, hlm. 29) menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Mubyarto (dalam Mardikanto & Soebiato 2013, hlm. 47) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

World Bank (dalam Mardikanto & Soebiato 2013, hlm. 27) mengartikan pemberdayaan yaitu: Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, gagasangagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Suharto (2011:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan

menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.

Menurut Ambar Teguh (Azhim, Afifuddin & Hayat, 2019:13) pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Vindyandika (2011: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sadar dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon *antisistem*, *antistruktur*, dan *antideterminisme* yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2011: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sadar dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernisme*. Aliran ini menitikberatkan

pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.3.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12), pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Kartasmita (2012:45) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “peoplecentered, participatory, empowering and sustainable”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya

mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya.

Jim Ife (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif, yakni : Pluralis, Elitis, Strukturalis dan post-strukturalis.

Zubaedi (2013: 21-22), menjelaskan 4 perspektif tersebut sebagai berikut. Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda

perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentukbentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Menurut Sumaryadi (2005:111) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:115) pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat

Widjaja (2013:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. karya secara efektif dan efisien.

2.4 Pengertian Purun

Purun merupakan salah satu tumbuhan endemik yang tumbuh liar secara alam pada area gambut dan rawa (Brecht, 1998). Purun banyak ditemukan di area gambut dan rawa di Indonesia seperti wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Noor dkk., 2005, Budiman dkk, 1988, BPS 2019, Pritmadi dkk, 2006), Sumatera Utara dan Riau (Masganti, 2014). Purun termasuk dalam famili Cyperaceae (Jumberi et al. 2006). Tanaman ini termasuk tumbuhan khas eli lahan rawa (Barbour & Pitts 1987).

Laban rawa merupakan laban dalam waktu yang panjang selama setahun selalu jenuh air atau tergenang (Mitsch dkk, 2000). Purun dapat ditemukan pada lokasi tertentu pada laban rawa dan pertumbuhannya tidak memerlukan musim dan waktu tertentu, karena tergolong sebagai tumbuhan liar (Indrayati 2011).

Purun merupakan tumbuhan yang hidup liar secara alami pada wilayah rawa gambut, rawa pasang surut dan areal sungai yang bersifat sulfat masam. Populasi purun cukup banyak ditemui di sekitar rawa gambut dan rawa pasang surut, serta areal anak Sungai.

2.5 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

2.5.1 Pengertian UMKM

UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung pada aspek-aspeknya. Di Indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinikannya, diantaranya :

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

- 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

- 1 Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja limasampai dengan 19 orang.
- 2 Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20sampai dengan 99 orang.

Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM, diantaranya adalah:

- 1 Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
- 2 Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pemberdayaan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:
 - a) Industri manufaktur
 - b) Agribisnis
 - c) Bisnis kelautan
 - d) Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pemberdayaan Kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan

perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pemberdayaan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat

2.5.2 Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha – usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima
UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- b) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- c) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Table 1 Karakteristik UMKM

Ukuran usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah • Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP Contoh: Pedagang kaki lima dan pedagang di Pasar

<p>Usaha Kecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. • Sudah membuat neraca usaha • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP • Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. • Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. • Contoh : Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
<p>Usaha Menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan • Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga • Sudah memiliki persyaratan akses kepada

	<p>sumber-sumber pendanaan perbankan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Contoh : Usaha pertambangan batu gunung untuk• konstruksi dan marmet buatan
--	---

Sumber : Bank Indonesia



Table 2 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp.50 juta Maksimal Rp. 300 juta	Maksimal Rp.50 juta Maksimal Rp. 300 juta
Usaha kecil	Lebih dari Rp.50 juta	Lebih dari Rp.50 juta
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500	Lebih dari Rp. 500

Sumber : Bank Indonesia

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

- 1 Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam.
- 2 Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- 3 Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
- 4 Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- 5 Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- 6 Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

- 1 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3 Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.6 Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Edwin B. Flippo mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut. “Pemberdayaan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: “ pemberdayaan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Pemberdayaan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuhkan-kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pemberdayaan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

Imsar menyatakan bahwa pemberdayaan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai tujuan.

Sementara kaitannya dengan pemberdayaan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia
4. Desain dan Teknologi

2.7 UMKM Kerajinan Purun

Kerajinan Anyaman Purun di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, mampu merubah tanaman purun yang dikenal sebagai gulma (rumput) dan kerap tumbuh di rawa-rawa menjadi beragam kerajinan tangan menarik dan berkualitas.

Menurutnya, sejak jaman dulu para leluhur telah memanfaatkan purun menjadi hasil kerajinan tangan. Namun saat itu, kerajinan tangan yang dihasilkan para leluhur masih monoton dalam bentuk tikar tradisional.

Sekira tahun 2015, kelompok tersebut mendapat pelatihan dari PT Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu Field, berupa inovasi pembuatan produk kerajinan tangan berbahan dasar purun.

Di bawah binaan Pertamina CSR, Kelompok Serasi didukung dengan pengadaan mesin jahit dan bantuan pemasaran, termasuk edukasi pemasaran secara digital dengan mempromosikannya melalui akun media sosial.

Dicontohkan, kini setiap ibu-ibu pengrajin mampu membuat 30 tas tiap bulannya, meski jumlah itu masih bisa digenjot bila ada pesanan dalam jumlah besar. Untuk harga, terangnya, setiap hasil kerajinan tangan dijual dengan harga bervariasi mulai Rp20-100 ribu tergantung jenis dan tingkat kesulitan pembuatannya.

Diketahui, hingga saat ini Masyarakat mampu memproduksi 28 jenis hasil kerajinan tangan dari purun, yang bahkan sempat dipamerkan dalam sebuah ajang pameran seni di Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut Manager Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu Field M Luthfi Ferdiansyah, pelatihan dan bantuan itu adalah upaya pihaknya dalam menyelesaikan masalah perekonomian di wilayah tersebut, dengan memadukan potensi budaya yang ada, yakni keterampilan menganyam masyarakat di Kecamatan wampu dengan sumber daya purun yang melimpah.

Upaya memberdayakan masyarakat secara ekonomi tak boleh lepas dari budaya dan potensi daerah itu sendiri. Dengan begini, budaya menganyam dan kerajinan tangan lainnya menggunakan bahan purun dapat terus terjaga, sedangkan purun yang selama ini menjadi masalah bagi kelompok tani dapat

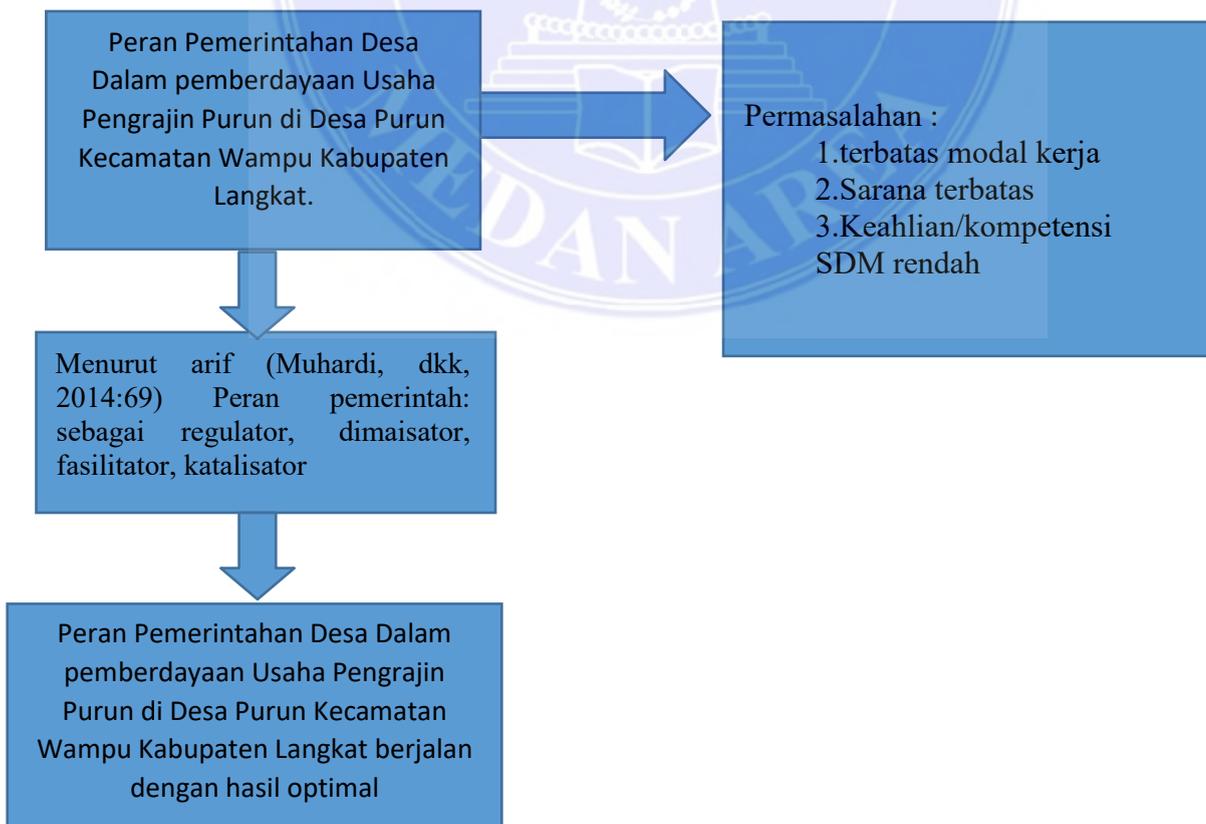
diubah menjadi bahan dasar kerajinan tangan menarik dan memiliki nilai jual.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi industri dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat tempat industri pandai besi itu berada. Keberhasilan dalam menekuni usaha kerajinan purun ini ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya manajemen usaha, pemasaran dan teknologi. Melalui manajemen yang baik, maka pemilik industri kerajinan purun tersebut akan mampu mengatasi kendala-kendala produksi yang ditemui, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil usaha.

2.8 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Romi Satria Wahono (2020:54) Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep pada tesis. Kerangka pikir dalam penelitian Peran pemerintahan desa Dalam

Gambar 1 Pemberdayaan UMKM pengrajin purun



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Mekar Jaya Kecamatan wampu Kabupaten Langkat. Waktu penelitian mulai bulan Juni 2024.

3.2 Jenis Penelitian

Metodologi dalam studi ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif. Adapun pengertian metode penelitian kualitatif didasarkan pada metode filsafat posteriori/interpretatif, digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai alat kunci, dan teknologi pengumpulan data diperoleh melalui triangulasi (gabungan observasi, wawancara), dokumentasi) Data seringkali merupakan data kualitatif, analisis data bersifat induksi/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ialah memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Peneliti kualitatif ialah data yang pasti. Sugiyono (2018). Penggunaan metode kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan dalam mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM pada sentra industri Purun Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat secara mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2010:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

- 3) informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian adalah para pegawai yang berkaitan dengan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dan beberapa orang luar (masyarakat) sebagai perajin purun yaitu diantaranya :

1. Informasi Kunci : Kepala desa
2. Informasi Utama : kasi pemberdayaan
3. Informasi Tambahan : pengrajin purun (3 orang)

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, arsip-arsip, buku, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya (data itu diperoleh tanpa ada perantara dari sumbernya), yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun data yang diperoleh berupa opini subjek individual, kelompok atau hasil observasi terhadap suatu keadaan serta kejadian juga problem yang ada dalam pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber aslinya (data/informasi yang didapatkan melalui pihak ketiga), seperti data yang diperoleh dari lembaga atau institusi yang ada dan atau ada kaitannya dengan pelayanan E-KTP berupa catatan atau laporan harian yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) baik yang dapat dipublikasikan maupun yang tidak dapat dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Hardani dkk (2020:122), menyatakan bahwa: *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.*

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu antara lain :

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

Nazir dalam Hardani dkk (2020:138), berpendapat bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

b. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan

sebenarnya. Riyanto dalam Hardani dkk (2020:125), menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti perilaku pegawai saat melayani, proses pelayanan pegawai terhadap masyarakat, pimpinan yang memberikan arahan, pegawai disdukcapil yang sedang rapat.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan. Sugiyono dalam Hardani dkk (2020:150), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6 Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1 Definisi Operasional

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

3.6.2. Definisi Konsep

Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. Peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat.
- b. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
- c. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- e. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

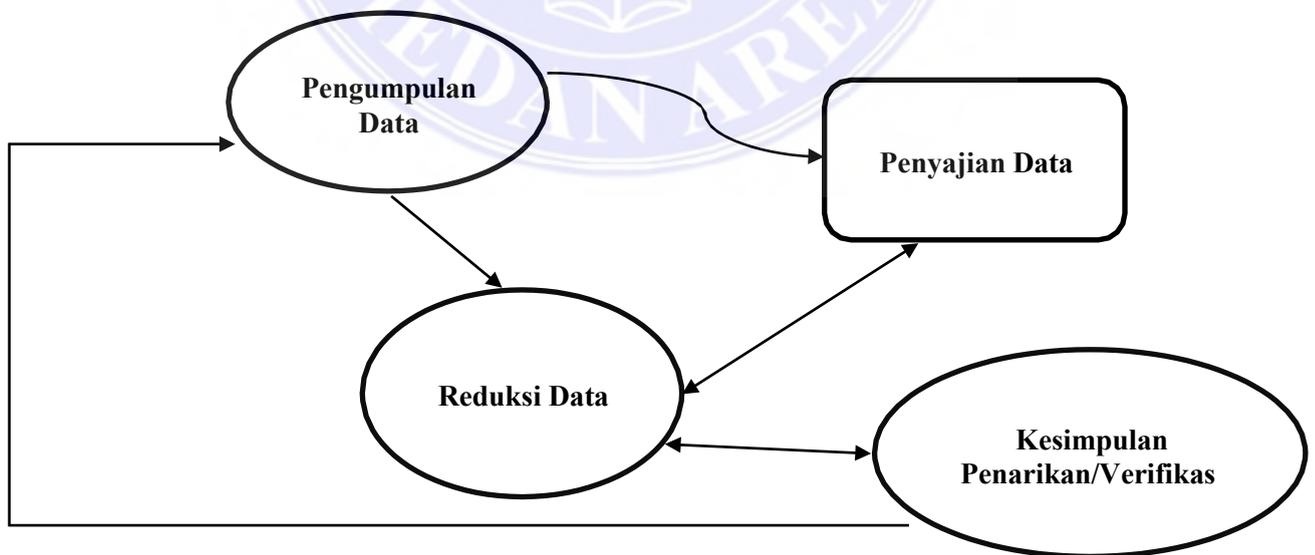
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Hardani dkk (2020:163), analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani dkk (2020:163), dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan.

Gambar 2 Model analisis interaktif Miles



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti ; observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah Kualitas Pelayanan Pegawai dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan

dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu

temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Pengerajinan Purun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

peran pemerintah desa sebagai katalisator sangat penting dalam pemberdayaan pengerajin purun. Dengan mendorong kolaborasi, membangun jaringan, dan mendukung inovasi, pemerintah desa berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha pengerajin. Inisiatif ini memungkinkan pengerajin untuk mengakses informasi dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pemerintah desa memiliki peran signifikan sebagai katalisator dalam pemberdayaan pengerajin purun di Desa Mekar Jaya. Melalui upaya untuk menghubungkan berbagai pihak dan mendorong inovasi, diharapkan pengerajin dapat berkembang, meningkatkan kualitas produk, dan berkontribusi pada perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pengrajin dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

5.2 Saran

Dalam pemberdayaan pengrajin purun di Desa Mekar Jaya, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan usaha pengrajin. Faktor-faktor tersebut telah diidentifikasi dan diatasi melalui berbagai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berikut adalah penyelesaian dari faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Keterbatasan Modal Usaha

Faktor Penghambat:

Banyak pengrajin purun yang kesulitan dalam mengakses modal untuk membeli bahan baku dan meningkatkan kapasitas produksi. Keterbatasan modal ini menyebabkan pengrajin terjebak pada produksi skala kecil, yang sulit untuk berkembang.

Penyelesaian:

Pemerintah desa memfasilitasi pengrajin untuk mendapatkan akses bantuan modal, baik melalui program pinjaman mikro dari lembaga keuangan setempat maupun bantuan hibah dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan pelatihan manajemen keuangan, yang membantu pengrajin untuk lebih efektif mengelola dana yang dimiliki dan memanfaatkan modal yang ada dengan lebih bijaksana.

2. Terbatasnya Akses Pasar

Faktor Penghambat:

Banyak pengrajin purun yang hanya dapat mengandalkan pasar lokal dan tidak memiliki akses untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional.

Penyelesaian:

Pemerintah desa bertindak sebagai katalisator untuk menghubungkan pengrajin dengan pasar yang lebih luas melalui pameran produk dan kerja sama dengan distributor. Selain itu, pelatihan mengenai pemasaran digital dilakukan untuk

membantu pengrajin memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial guna mempromosikan produk mereka secara lebih efektif. Pemerintah desa juga memfasilitasi pengrajin dalam mengakses berbagai bazaar dan event promosi yang dapat memperkenalkan produk purun ke pasar yang lebih besar.

3. Kurangnya Keterampilan dan Inovasi dalam Produksi

Faktor Penghambat:

Sebagian pengrajin masih menggunakan teknik tradisional yang terbatas, yang menyebabkan kualitas dan variasi produk mereka kurang berkembang dan tidak dapat bersaing dengan produk kerajinan lain yang lebih inovatif.

Penyelesaian:

Pemerintah desa mengadakan pelatihan keterampilan yang mencakup pengembangan teknik produksi dan desain produk. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan inovasi desain yang dapat menarik minat konsumen. Selain itu, pemerintah desa menyediakan alat produksi yang lebih efisien, yang memudahkan pengrajin dalam menghasilkan produk yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih besar.

4. Kurangnya Pengetahuan tentang Teknologi dan Pemasaran Digital

Faktor Penghambat:

Banyak pengrajin belum memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka, yang menghambat potensi pengembangan usaha mereka, khususnya dalam pemasaran online.

Penyelesaian:

Pemerintah desa menyediakan pelatihan tentang pemasaran digital dan cara memanfaatkan media sosial serta platform e-commerce untuk memperkenalkan

produk mereka kepada pasar yang lebih luas. Pengrajin diberikan pengetahuan tentang strategi pemasaran online, seperti penggunaan Instagram, Facebook, dan marketplace, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan potensial di luar daerah mereka. Hal ini membantu pengrajin dalam memperkenalkan produk secara lebih luas dan meningkatkan volume penjualan.

5. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Produksi

Faktor Penghambat:

Pengrajin seringkali menghadapi masalah terkait dengan infrastruktur produksi yang kurang memadai, seperti keterbatasan ruang produksi dan peralatan yang tidak efisien.

Penyelesaian:

Pemerintah desa bekerja untuk menyediakan fasilitas produksi yang lebih baik, seperti bengkel bersama atau ruang produksi bersama yang dapat digunakan oleh pengrajin. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pengrajin dapat bekerja lebih efisien dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selain itu, pengrajin juga diberikan bantuan untuk memperoleh peralatan produksi yang lebih modern, yang mendukung proses produksi yang lebih cepat dan hasil yang lebih berkualitas.

6. Kurangnya Kolaborasi Antar Pengrajin

Faktor Penghambat:

Pengrajin purun sering kali bekerja secara individu dan tidak memiliki jaringan yang kuat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta memperkuat daya saing bersama.

Penyelesaian:

Pemerintah desa mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama atau koperasi

di antara para pengrajin purun. Kolaborasi ini memungkinkan pengrajin untuk berbagi sumber daya, saling mendukung dalam proses produksi, dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Dengan adanya kelompok usaha, pengrajin dapat bekerja secara kolektif dalam memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah dan mengembangkan strategi pemasaran bersama yang lebih efektif.

Penyelesaian faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan pengrajin purun di Desa Mekar Jaya menunjukkan upaya yang signifikan dari pemerintah desa dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi pengembangan usaha kerajinan. Melalui akses modal, pelatihan keterampilan, fasilitas produksi yang lebih baik, dan akses pasar yang lebih luas, berbagai hambatan yang dihadapi pengrajin dapat diatasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, inovasi produk, serta pemasaran yang lebih efisien, sehingga pengrajin purun di Desa Mekar Jaya dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Nasution, S. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, A. (2019). *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Assauri, 1999. *Manajemen Pemasaran*. Raja Grafindo Persada; Jakarta Bungin, Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif*. Kencana; Jakarta
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3*, Balai Pustaka; Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press; Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Gava Media; Yogyakarta
- Ghuffan, Ahmad, dan Sudarsono. 1991. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Rineka Cipta; Jakarta
- Handayadiningrat. 1998. *Peranan Aparatur Pemerintah*. Sinar Harapan; Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 1994. *Manajemen Pelayanan Publik*. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Kencana, Inu. 2004. *Pemerintah Indonesia*. Jakarta; Mandar Maju Manurung, Hendarso. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta; Diktat Marsuki. 2006. *Mendorong Investasi Melalui Pelayanan Publik*; Jakarta
- Moenir, H. A. S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesi*. Jakarta; PT. Bumi Aksara

Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja
RoMoleong

Swakarya

Nawawi, Hadari.1995. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan
Aparaturpemerintah*; Penerbit Erlangga, Jakarta

Pramudji. 1994. *Profesionalisme Aparatur Negar*. Rineka Cipta; Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka; Jakarta

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES; Jakarta

Sinambela, L.P. 2006. *Teori Kebijakan dan Implementasi, Reformasi
Pelayanan*

Publik.Sampara

Situmorang, M. Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*,

Sinar Grafika; Jakarta

Jurnal :

Rachman, F. (2021). "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi
Lokal."

Jurnal Pembangunan Desa, 5(2), 112-123.

Lestari, R. D. (2022). "Inovasi Produk Kerajinan: Strategi Pemberdayaan
Pengrajin."

Jurnal Ekonomi Kreatif, 3(1), 45-58.

Laporan :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. (2023). *Laporan
Tahunan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Langkat: Dinas PMD.

Artikel Online :

Putri, M. (2022). "Mengembangkan Usaha Kerajinan Purun di Desa." Diakses
dari www.ekonomiindonesia.com.

Tesis/Disertasi :

Hartono, B. (2021). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pengrajin Lokal:
Studi*

Kasus di Kabupaten Langkat. Tesis Magister. Universitas Sumatera Utara.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



Lampiran Dokumentasi Wawancara

1. wawancara dengan Muhammad Ripin. SE Kepala Desa Mekar Jaya





2. wawancara dengan Syafaruddin Bangun Kasi Pemberdayaan Desa Mekar Jaya



3. wawancara dengan Ngatini ketua Perajin Purun Desa Mekar Jaya:



4 wawancara dengan Suaiba sekretaris Perajin Purun Desa Mekar Jaya:



5 wawancara dengan nasriati Bendahara Perajin Purun Desa Mekar Jaya:



6 wawancara dengan Lisa Br Bangun masyarakat lokal Desa Mekar Jaya:

